



Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* dalam Proses Pembayaran dan Penagihan Piutang Usaha di PT. BLY

Kadek Desinta Maharani Suryana^{1*}, Indrawati Yuhertiana²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

¹22013010310@student.upnjatim.ac.id, ²yuhertiana@upnjatim.ac.id

Korespondensi penulis: 22013010310@student.upnjatim.ac.id

Abstract. *This study focuses on the implementation of Good Corporate Governance values such as transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in managing payments and accounts receivable collection at PT. BLY, a galvanizing services company based in Surabaya. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews and observations over five months. The results indicate that these five principles have been consistently applied, supported by a well-organized recording system, complete documentation, and coordination across divisions. However, challenges such as document delays and potential human errors need to be addressed. Aging reports of receivables and payables reflect healthy financial management. This study recommends improving the information system and staff training to strengthen the implementation of Good Corporate Governance and support the sustainable continuity of PT. BLY's business.*

Keywords: *Good Corporate Governance, Transparency, Accountability, Payment, Accounts Receivable Collection*

Abstrak. Penelitian ini fokus pada pelaksanaan nilai-nilai *Good Corporate Governance* seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan pembayaran serta penagihan piutang usaha di PT. BLY, perusahaan jasa galvanisasi di Surabaya. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi selama lima bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima prinsip tersebut telah diterapkan secara konsisten, didukung sistem pencatatan yang rapi, dokumen lengkap, serta koordinasi antar divisi. Namun terdapat kendala seperti keterlambatan dokumen dan potensi human error yang perlu diantisipasi. Laporan aging piutang dan utang mencerminkan pengelolaan keuangan yang sehat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sistem informasi dan pelatihan staf guna memperkuat implementasi *Good Corporate Governance* dan mendukung kelangsungan bisnis PT. BLY secara berkelanjutan.

Kata kunci: *Good Corporate Governance, Transparansi, Akuntabilitas, Pembayaran, Penagihan Piutang*

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif merupakan kunci penting bagi keberlangsungan dan perkembangan sebuah perusahaan. Dalam praktik bisnis, proses pembayaran kepada *supplier* dan penagihan piutang usaha kepada *customer* menjadi dua siklus utama yang memengaruhi kelancaran arus kas dan kesehatan keuangan secara menyeluruh. Ketidakefisienan dalam pengelolaan kedua proses tersebut dapat menimbulkan risiko seperti keterlambatan pembayaran, piutang tak tertagih, hingga gangguan likuiditas, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan. Oleh karena itu, tata kelola keuangan yang baik harus dibangun di atas prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yang

Received: June 26, 2025; Revised: July 01, 2025; Accepted: July 08, 2025

*Corresponding author, e-mail address

bersifat terintegrasi dan mendukung transparansi serta akuntabilitas dalam setiap proses keuangan. Secara teori, tata kelola perusahaan yang baik dapat diartikan sebagai kumpulan aturan, kebijakan, dan mekanisme yang diterapkan untuk mengarahkan serta mengontrol perusahaan agar dapat meningkatkan nilai perusahaan sekaligus melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (Rochendi & Soesanto, 2023). Akuntabilitas dalam akuntansi merupakan unsur krusial untuk mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, terutama terkait dengan keterbukaan laporan dan pengelolaan risiko (Kusumaningtiyas et al., 2016). Dalam konteks pengelolaan piutang usaha, peran analisis akuntansi proses pengakuan, pencatatan, dan penilaian risiko tak tertagih menjadi aspek krusial yang harus dilakukan secara cermat agar laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan membantu perusahaan mengantisipasi potensi kerugian (Amalia, 2025). Pengelolaan keuangan yang efektif, bila didukung oleh pengawasan internal dan kompetensi aparatur, terbukti mampu meningkatkan kinerja perusahaan melalui perbaikan manajemen keuangan dan kualitas layanan publik (Priono et al., 2019).

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik memiliki peranan penting bagi perusahaan untuk menjamin keterbukaan informasi, tanggung jawab yang jelas, serta pengelolaan risiko yang efektif. Hal ini membantu menjaga kestabilan keuangan, membangun kepercayaan dari berbagai pihak terkait, dan mendukung keberlanjutan bisnis di tengah dinamika pasar global (Kuswanto, 2024). Seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya praktik tata kelola yang berkualitas, penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan di Indonesia terus mengalami kemajuan signifikan. Bukti nyata dari hal tersebut terlihat dari penghargaan yang diraih Bank DKI sebagai “*The Best Indonesia GCG Awards 2025*” yang menjadi apresiasi atas konsistensi dan transparansi dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Antara News, 2025). elain itu, PT Reasuransi Indonesia Utama juga menguatkan penerapan tata kelola yang baik sebagai strategi utama guna meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas di pasar, sebagaimana dilaporkan pada tahun 2023 (Liputan6, 2023). Di tengah tantangan globalisasi, penerapan standar tata kelola perusahaan yang selaras dengan standar internasional menjadi kebutuhan strategis agar perusahaan mampu bersaing secara global. Oleh karena itu, penerapan praktik pengelolaan yang tepat tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga fondasi utama dalam menjaga kesinambungan operasional dan meningkatkan daya saing. PT. BLY sendiri merupakan perusahaan jasa galvanisasi yang berpusat di Surabaya dengan keahlian pada proses pelapisan logam menggunakan metode celup panas (*hot dip galvanizing*), beroperasi di tengah kompleksitas dan integrasi bisnis global yang semakin tinggi.

Saat praktik implementasi, salah satu aspek fundamental dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sistem pengendalian internal yang dirancang guna menghindari terjadinya kesalahan, tindakan kecurangan, serta menjamin kepatuhan terhadap kebijakan internal perusahaan, terutama dalam proses pembayaran dan penagihan (Irna Susilawati et al., 2024). Evaluasi rutin terhadap pengendalian internal penting dilakukan agar perusahaan dapat menemukan kelemahan, seperti tugas yang tumpang tindih, kesalahan dalam input data, atau prosedur kerja yang belum jelas, sehingga perusahaan dapat memperbaiki kekurangan sistem, meningkatkan tanggung jawab, dan memperkuat pengawasan (A.Lasmana, 2024). Lebih lanjut, penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan piutang usaha berkontribusi terhadap terbentuknya kebijakan penagihan yang bertanggung jawab dan efisien, sehingga mampu menurunkan risiko piutang macet dan meningkatkan kepercayaan *stakeholder* (Pramesti & Purnamawati, 2024).

Namun, demikian dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara idealitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dengan realitas di lapangan yang menunjukkan kelemahan dalam sistem pengendalian internal serta belum optimalnya integrasi sistem informasi akuntansi pada proses pembayaran dan penagihan piutang usaha. Kondisi tersebut tidak hanya dialami secara umum oleh banyak perusahaan manufaktur di Indonesia, namun juga terjadi pada PT. BLY, yang meskipun memiliki prosedur keuangan, penerapannya belum sepenuhnya selaras dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara menyeluruh. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan menitikberatkan analisis komprehensif terkait implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada sektor jasa galvanisasi, yang masih kurang banyak diteliti dalam literatur sebelumnya, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi berarti bagi penguatan tata kelola keuangan perusahaan sejenis.

Penelitian ini difokuskan pada pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) diimplementasikan dalam proses pembayaran kepada *supplier* dan penagihan piutang usaha kepada *customer* di PT. BLY. Penelitian ini juga difokuskan untuk mengungkap berbagai aspek yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam kedua proses tersebut, serta mengevaluasi sejauh mana penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dapat terlaksana dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam proses pembayaran dan penagihan piutang usaha di PT. BLY, serta mengidentifikasi berbagai elemen yang mendukung maupun menghambat efektivitas penerapan prinsip tersebut dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang

transparan, akuntabel, dan efisien. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik sehingga memberikan dampak positif terhadap kinerja dan keberlangsungan PT. BLY.

2. KAJIAN TEORITIS

Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) adalah mekanisme penting yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi operasional perusahaan dengan tujuan utama menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham serta para pihak yang berkepentingan. Melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan akuntabel, perusahaan dapat memastikan manajemen berjalan secara profesional dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini pada akhirnya membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan (Sudarmanto et al., 2021). Tata kelola perusahaan yang baik dibangun atas lima prinsip utama, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Transparansi mengacu pada penyampaian informasi penting dan relevan secara terbuka, tepat waktu, dan mudah diakses oleh para pihak terkait. Akuntabilitas berarti adanya kejelasan peran, pelaksanaan tugas, serta tanggung jawab dalam struktur organisasi perusahaan. Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip fundamental dalam praktik akuntansi yang bertujuan untuk memastikan informasi keuangan disajikan secara jujur, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan (Ramadhani Sam et al., 2024). Responsibilitas menuntut perusahaan untuk mematuhi hukum dan norma yang berlaku serta melaksanakan kewajiban sosialnya. Independensi memastikan pengelolaan perusahaan berjalan secara objektif tanpa adanya campur tangan atau konflik kepentingan dari pihak manapun. Terakhir, kewajaran menegaskan perlakuan yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing (Sudarmanto et al., 2021). Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara efektif dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dengan mendorong efisiensi operasional serta pengambilan keputusan yang tepat dan transparan. Dengan adanya *Good Corporate Governance* (GCG), perusahaan mampu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kepercayaan investor, sehingga berdampak positif pada profitabilitas dan kesinambungan usaha (Budi gautama Siregar, 2021). Perusahaan yang gagal menerapkan transparansi dan akuntabilitas berisiko mengalami krisis kepercayaan dan sanksi hukum yang dapat menyebarkan kebangkrutan (Sandy et al., 2025).

Utang Usaha

Utang usaha adalah kewajiban perusahaan yang timbul dari transaksi pengadaan barang atau jasa secara kredit kepada *supplier* (Rahmawati & Handayani, 2025). Utang usaha mencerminkan kewajiban perusahaan kepada *supplier* yang harus dikelola secara efektif untuk menjaga hubungan dan kelancaran operasional, meskipun sering terhambat oleh kesalahan internal atau ketidaksesuaian eksternal. Hambatan ini dapat menimbulkan keterlambatan pembayaran yang berdampak pada arus kas dan reputasi perusahaan. Keterbatasan sumber daya seperti personel dan waktu membuat pengelolaan utang usaha kurang efektif (Enow & Kamala, 2016). Perusahaan yang membayar utang lebih awal atau tunai berisiko kehilangan manfaat kredit dari *supplier*, sehingga pengelolaan utang yang baik penting untuk memastikan pembayaran tepat waktu, akurat, dan transparan demi kestabilan keuangan.

Piutang Usaha

Piutang usaha merupakan aset lancar yang muncul akibat penjualan barang atau jasa secara kredit, dengan pembayaran yang dilakukan pelanggan dalam periode tertentu setelah barang atau jasa diterima (Afifah & Handayani, 2025). Pengelolaan piutang efisien penting untuk menjaga likuiditas dan keuntungan dengan mengurangi risiko keterlambatan dan piutang tak tertagih melalui kebijakan kredit, prosedur penagihan, serta pelatihan dan pemantauan. Pendekatan pengelolaan yang tepat membantu mengurangi risiko piutang macet dan memperkuat posisi keuangan perusahaan dalam jangka panjang (Deventer, 2023). Dengan demikian, perusahaan menjaga likuiditas sekaligus meningkatkan profitabilitas dan mempertahankan kelangsungan operasional secara optimal (Surono et al., 2015). Pendekatan pengelolaan yang tepat membantu mengurangi risiko piutang macet dan memperkuat posisi keuangan perusahaan dalam jangka panjang.

Proses Pembayaran dan Penagihan Piutang Usaha

Penagihan piutang usaha penting karena mencerminkan hak perusahaan atas pembayaran kredit, dengan efektivitas diukur dari rasio perputaran dan periode pengumpulan piutang yang lebih pendek. Selain itu, prinsip konservatisme mengharuskan perusahaan menyediakan penyisihan piutang berdasarkan umur piutang untuk mengantisipasi risiko piutang tak tertagih, sehingga pengelolaan piutang yang baik meliputi pengawasan umur piutang, pencatatan penyisihan yang tepat, dan prosedur penagihan sistematis demi menjaga likuiditas perusahaan (Lahengking et al., 2017). Manajemen pembayaran utang penting karena keterlambatan akibat kesalahan internal atau pesanan tidak sesuai bisa merusak hubungan bisnis, arus kas, dan reputasi perusahaan. Rasio hutang yang tinggi juga berisiko menurunkan nilai perusahaan karena peningkatan beban bunga dan risiko keuangan, mengingat utang merupakan sumber

pembiayaan yang memiliki tingkat risiko tinggi dan pembayaran bunganya tidak selalu dapat ditutupi perusahaan (Mudin et al., 2023). Pengelolaan piutang dan utang yang efektif kunci kelancaran arus kas dan kinerja keuangan, terutama bagi usaha kecil yang rentan gagal bayar dan ketidakstabilan modal kerja. Oleh karena itu, pengelolaan pembayaran yang tepat waktu, akurat, dan transparan menjadi perhatian utama dalam menjaga kestabilan keuangan sekaligus mendukung nilai perusahaan (Anorue & Ugwoke, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, mengutamakan metode studi kasus sebagai teknik utama untuk memahami fenomena secara mendalam. Menurut (Fiantika et al., 2022), pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara mendalam makna, perilaku, dan pengalaman subjek dalam kondisi alami dengan fleksibilitas deskriptif, serta mengandalkan data wawancara, observasi, dan dokumen. Penelitian dilakukan di PT. BLY, perusahaan yang bergerak di bidang jasa galvanisasi, selama rentang waktu lima bulan, mulai dari 13 Januari 2025 hingga 13 Juni 2025. Untuk mendapatkan data yang komprehensif, peneliti melaksanakan wawancara secara mendalam dengan empat narasumber terpilih serta melakukan observasi langsung pada lingkungan kerja perusahaan. Wawancara di PT. BLY dilakukan pada 9 dan 12 Juni 2025 dengan empat staf dari berbagai bagian. Total terdapat 20 pertanyaan yang diajukan kepada para informan, dimulai dengan AL (penerbit faktur penjualan) pada pukul 09.54 WIB, YR (kasir) pada pukul 10.03 WIB, IR (bagian pembayaran pengeluaran) pada pukul 10.30 WIB, dan AR (bagian penagihan) pada tanggal 12 Juni pukul 13.22 WIB. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dibagi secara merata, masing-masing lima pertanyaan untuk setiap informan, dan disusun berdasarkan lima prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, dan transparansi. Namun, dalam penelitian ini, daftar pertanyaan dan jawaban yang diperoleh telah disaring kembali untuk memastikan relevansi, keakuratan, serta kesesuaiannya dengan fokus penelitian, sehingga hanya data yang mendukung analisis dan pembahasan yang disajikan lebih lanjut. Setiap informan menerima pertanyaan yang relevan dengan peran dan tanggung jawabnya di PT. BLY, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2.

Tabel 1. 1 Data Informan

Nama Informan	Jenis Kelamin	Jabatan	Divisi/Bagian
<i>AL</i>	Perempuan	Staf	Keuangan/Penerbit Faktur Penjualan
<i>YR</i>	Perempuan	Staf	Keuangan/Kasir
<i>IR</i>	Perempuan	Staf	Keuangan/Pembayaran Pengeluaran
<i>AR</i>	Perempuan	Staf	Keuangan/Penagihan

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti (2025)

Tabel 1. 2 Daftar Pertanyaan

Prinsip GCG	Daftar Pertanyaan
Transparansi (<i>Transparency</i>)	Staf Penerbit Faktur Penjualan: Bagaimana proses pembuatan dan pencatatan faktur penjualan serta surat jalan dilakukan agar informasi tercatat dengan jelas dan dapat ditelusuri? Staf Kasir: Bagaimana Anda memastikan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tercatat dengan jelas dan sesuai prosedur? Staf Penagihan: Bagaimana Anda menangani situasi ketika dokumen tagihan piutang belum lengkap agar proses penagihan tetap jelas dan dapat dipertanggungjawabkan?
Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)	Staf Kasir: Bagaimana Anda menjaga tanggung jawab dalam pengelolaan kas agar tidak terjadi kekurangan atau kesalahan? Staf Penagihan: Bagaimana Anda memastikan data pelaporan piutang yang disampaikan ke manajemen akurat dan dapat dipertanggungjawabkan?
Responsibilitas (<i>Responsibility</i>)	Staf Kasir: Apa saja tanggung jawab Anda sebagai kasir, terutama dalam menerima pembayaran dari <i>customer</i> dan melakukan pembayaran ke <i>supplier</i>? Staf Pembayaran Pengeluaran: Apa tanggung jawab Anda dalam memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu? Staf Penagihan: Bagaimana Anda menangani piutang yang sudah lama tertunggak dan <i>customer</i> sulit dihubungi?
Independensi (<i>Independence</i>)	Staf Penerbit Faktur Penjualan: Apakah bagian penerbit faktur bisa menjalankan tugas sesuai prosedur tanpa campur tangan dari pihak lain? Staf Pembayaran Pengeluaran: Bagaimana Anda menjalankan tugas pembayaran ketika dokumen kurang lengkap? Staf Penagihan: Bagaimana Anda menjaga sikap objektif dan independen dalam menghadapi tekanan agar proses penagihan tetap berjalan sesuai prosedur?
Kewajaran (<i>Fairness</i>)	Staf Penerbit Faktur Penjualan: Bagaimana Anda memastikan perlakuan yang adil bagi <i>customer</i> dalam proses pembuatan faktur? Staf Pembayaran Pengeluaran: Apakah semua <i>supplier</i> diperlakukan sama dalam proses pembayaran?

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti (2025)

Data yang diperoleh dianalisis dengan mengombinasikan beberapa teknik, yaitu wawancara dan observasi (triangulasi teknik), serta menggunakan berbagai sumber informasi dari staf divisi keuangan dengan bagian yang berbeda (triangulasi sumber). Proses analisis difokuskan pada penggalan aspek-aspek penting terkait penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan pembayaran dan penagihan piutang usaha di PT. BLY.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

a) Hasil Wawancara dengan Informan AL (Staf Penerbit Faktur Penjualan)

- Informan AL menjelaskan terkait prinsip transparansi bahwa *“Surat jalan itu dari gudang. Ada dua jenis pembayaran yaitu tunai dan tagihan. Kalau tunai langsung ke kasir surat jalan dan faktur langsung dibuat. Kalau tagihan biasanya fakturnya baru dibuat besoknya. Setelah surat jalan ditandatangani langsung dikirim ke customer. Pembayaran mengikuti jatuh tempo. Semua dicatat di buku serah terima yang tunai ke kasir dan yang tagihan ke Mbak AR.”*
- Informan AL menjelaskan terkait prinsip independensi bahwa *“Faktur tidak bisa memverifikasi sendiri, semua sesuai dengan surat jalan dan data dari marketing.”*
- Informan AL menjelaskan terkait prinsip kewajaran bahwa *“Semua proses pembuatan faktur berdasarkan surat jalan dan harga yang ditentukan marketing. Tidak ada perlakuan khusus untuk customer tertentu.”*

b) Hasil Wawancara dengan Informan YR (Staf Kasir)

- Informan YR menjelaskan terkait prinsip transparansi bahwa *“Kita pakai sistem Datamix. Setiap kali ada pengeluaran langsung dimasukkan ke sistem. Sebelum cash opname kita cek dulu saldonya. Kalau ada selisih biasanya karena pembulatan seratus atau dua ratus rupiah. Tapi semua tetap dicatat. Setiap minggu ada cash opname bareng accounting untuk pastikan saldo aman.”*
- Informan YR menjelaskan terkait prinsip akuntabilitas bahwa *“Kalau ada selisih kurang, ya kita yang harus mengganti. Alhamdulillah sejauh ini enggak pernah ada selisih, dan semoga jangan sampai ada. Sebelum kita melakukan cash opname, kita harus memberikan laporan kas ke accounting. Kalau laporannya enggak sesuai, biasanya mereka akan langsung protes. Misalnya di laporan kas tertulis lima puluh juta, tapi saldo aktualnya hanya empat puluh sembilan juta. Seharusnya kan ada*

selisih satu juta, dan harus ditelusuri ke mana perginya. Tapi alhamdulillah, sampai sekarang enggak pernah kejadian seperti itu.”

- Informan YR menjelaskan terkait prinsip responsibilitas bahwa *“Saya menangani pengeluaran cash kecil, misalnya lima jutaan atau dua jutaan. Kalau cash besar seperti ratusan juta sampai miliaran, itu Mbak IR yang tangani. Setiap minggu ada cash opname untuk memastikan saldo cash kasir sesuai. Semua pengeluaran cash pasti langsung dimasukkan ke sistem Datamix. Kalau pembayaran ke supplier, dokumen dari purchasing harus lengkap. Kalau ada dokumen yang kurang, misalnya surat jalan atau faktur pajak enggak ada, saya enggak akan proses pembayarannya. Tagihan tidak akan saya bayar sebelum dokumen lengkap.”*

c) Hasil Wawancara dengan Informan IR (Staf Penagihan)

- Informan IR menjelaskan terkait prinsip transparansi bahwa *“Contohnya seperti faktur pajak, itu biasanya dibuat oleh Mbak NN. Nah, kalau mau mengirim tagihan, dokumennya harus lengkap, seperti invoice, surat jalan, dan faktur pajak. Waktu awal tahun 2025 kemarin, sistem perpajakan mengalami perubahan, jadi sempat harus menunggu faktur pajak dari Mbak NN. Kalau dokumennya tidak lengkap, mereka akan menunda pembayaran. Jadi karena tidak lengkap, mereka belum mau bayar dulu. Kadang juga tagihannya dikembalikan ke saya.”*
- Informan IR menjelaskan terkait prinsip akuntabilitas bahwa *“Sebenarnya tetap ada kemungkinan meleset. Tapi kami biasanya punya perencanaan mingguan dan bulanan. Kadang Pak EK minta per minggu, kadang per bulan. Saya membuat perencanaan berdasarkan faktur yang masuk. Misalnya bulan Juni, maka saya akan mencatat semua faktur yang jatuh tempo di bulan Juni, lalu dilaporkan. Namun dalam praktiknya, bisa saja ada yang belum bayar atau justru sudah bayar lebih dulu.”*
- Informan IR menjelaskan terkait prinsip responsibilitas bahwa *“Biasanya saya langsung lapor ke bagian marketing. Karena marketing yang berhubungan langsung dengan customer. Kalau customer sudah lama tidak membayar, biasanya tidak diizinkan mengambil barang lagi sampai melunasi tagihan. Tujuannya supaya mereka segera membayar.”*

d) Hasil Wawancara dengan Informan AR (Staf Pembayaran Pengeluaran)

- Informan AR menjelaskan terkait prinsip responsibilitas bahwa *“Kami membuat perencanaan dan setiap hari naik ke atas untuk menemui Pak EK selaku senior*

manajer keuangan PT. BLY.”

- Informan AR menjelaskan terkait prinsip independensi bahwa “Iya, menggunakan checklist tadi. Barangkali ada yang kurang, seperti faktur pajak atau lainnya. Kadang ada beberapa customer yang non PPN. Kalau seperti itu, berarti tidak perlu melampirkan PPN. Kadang ada kwitansi, biasanya kwitansi sudah menjadi pengganti surat jalan menurut saya. Kadang ada customer bilang, ‘Loh Mbak, kok ada yang belum dibayar punya?’ Ternyata ada kendala di bagian Purchasing. Mereka belum mengirimkan dokumen atau informasi tertentu.”
- Informan AR menjelaskan terkait prinsip kewajaran bahwa “Tidak ada. Tergantung ada uangnya atau tidak. Memang kalau nominalnya besar harus disetujui oleh Pak EK. Saya hanya memastikan ada uang atau tidak. Tidak ada hal lain. Iya, makanya kami membuat perencanaan dan setiap hari naik ke atas untuk menemui Pak EK.”

e) Laporan Aging Piutang dan Utang

Laporan *aging* piutang menunjukkan bahwa sebagian besar piutang PT. BLY masih berada dalam kategori umur yang wajar dan dapat ditagih. Meskipun terdapat beberapa piutang yang sudah melewati jatuh tempo, secara umum perusahaan masih mampu menjaga kualitas piutangnya dengan baik. Kondisi ini mencerminkan pengelolaan penagihan yang cukup efektif dan mendukung kelancaran arus kas perusahaan.

PT. BLY													
LAPORAN AGING PIUTANG													
PERIODE JANUARI 2025													
Nama Customer	Saldo Piutang	Tgl Invoice	Jatuh Tempo (Hari)	Tgl Jatuh Tempo	Umur Piutang	Kategori Aging	Belum Jatuh Tempo	1-30 Hari	31-60 Hari	61-90 Hari	>90 Hari	Persentase Cadangan Kerugian Piutang	Cadangan Kerugian Piutang (Rp)
PT. AA	Rp 20.000.000	01/02/2025	7	08/02/2025	23	14-30 Hari	Rp -	Rp 20.000.000	Rp-	Rp-	Rp-	1%	Rp 200.000
PT. JR	Rp 35.000.000	10/02/2025	14	24/02/2025	7	Belum Jatuh Tempo	Rp 35.000.000	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	0%	Rp -
PT. MLC	Rp 25.000.000	01/01/2025	30	31/01/2025	40	31-60 Hari	Rp -	Rp-	Rp 25.000.000	Rp-	Rp-	5%	Rp 1.250.000
PT. SPLN	Rp 15.000.000	15/11/2024	30	15/12/2024	77	>60 Hari	Rp -	Rp-	Rp-	Rp-	Rp 15.000.000	10%	Rp 1.500.000
CV. AR	Rp 10.000.000	05/12/2024	25	30/12/2024	62	>60 Hari	Rp -	Rp-	Rp-	Rp-	Rp 10.000.000	10%	Rp 1.000.000
Total	Rp 105.000.000						Rp 35.000.000	Rp20.000.000	Rp 25.000.000	Rp-	Rp 25.000.000		Rp 3.950.000

Persentase Cadangan Kerugian Piutang Berdasarkan Kategori Umur Piutang:

Belum Jatuh
Tempo: 0%
1-30 Hari: 1%
31-60 Hari: 5%
61-90 Hari: 10%
> 90 Hari: 20%

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti (2025)

Gambar 1. 1 Laporan Aging Piutang di PT. BLY

Laporan *aging* utang menunjukkan bahwa kewajiban PT. BLY masih berada dalam kategori umur yang wajar dan belum melewati batas jatuh tempo yang berisiko. Hal ini mencerminkan bahwa perusahaan mampu mengelola utangnya dengan baik dan memiliki kondisi keuangan yang sehat dalam hal pembayaran kewajiban kepada

supplier.

PT. BLY										
LAPORAN AGING UTANG										
PERIODE JANUARI 2025										
Nama Supplier	Saldo Utang	Tgl Invoice	Jatuh Tempo (Hari)	Tgl Jatuh Tempo	Umur Utang	Kategori Aging	Belum Jatuh Tempo	1-14 Hari	15-30 Hari	>30 Hari
PT. YA	Rp 25.000.000	10/01/2025	14	24/01/2025	15	15-30 Hari	Rp-	Rp-	Rp 25.000.000	Rp-
PT. CCL	Rp 20.000.000	01/01/2025	30	31/01/2025	25	15-30 Hari	Rp-	Rp-	Rp 20.000.000	Rp-
Total	Rp 45.000.000						Rp -	Rp -	Rp 45.000.000	Rp -

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti (2025)

Gambar 1. 2 Laporan Aging Utang di PT. BLY

Pembahasan

a) Prinsip Transparansi (*Transparancy*)

PT. BLY menerapkan prinsip transparansi dalam pembayaran dan penagihan piutang untuk menyajikan informasi keuangan yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan. Transparansi mengacu pada penyampaian informasi penting dan relevan secara terbuka, tepat waktu, dan mudah diakses oleh para pihak terkait (Sudarmanto et al., 2021). Faktor pendukungnya meliputi pencatatan rapi, penggunaan teknologi *Datamix*, koordinasi antar divisi, kelengkapan dokumen seperti *invoice* dan faktur pajak, serta pengawasan rutin seperti *cash opname* mingguan. Sedangkan faktor penghambat berupa keterlambatan dokumen, perbedaan tanggal penerimaan barang dan purchase order, serta pencatatan selisih kas yang membutuhkan ketelitian ekstra, memengaruhi pengelolaan utang dan piutang. Utang usaha adalah kewajiban perusahaan yang timbul dari transaksi pengadaan barang atau jasa secara kredit kepada *supplier* (Rahmawati & Handayani, 2025), memerlukan pengelolaan yang akurat dan tepat waktu agar tidak mengganggu arus kas. Sedangkan piutang usaha merupakan aset lancar yang muncul akibat penjualan barang atau jasa secara kredit, dengan pembayaran yang dilakukan pelanggan dalam periode tertentu setelah barang atau jasa diterima (Afifah & Handayani, 2025). Laporan *aging* piutang menunjukkan bahwa sebagian besar piutang PT. BLY masih berada dalam kategori umur yang wajar dan dapat ditagih, sedangkan laporan aging utang juga menunjukkan kewajiban masih dalam batas wajar. Hal ini mendukung keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, transparansi memperkuat tata kelola sehat dan praktik keuangan yang efisien serta akuntabel. Berdasarkan hasil wawancara staf, menunjukkan transparansi

meningkatkan keakuratan proses keuangan dan memperkuat kepercayaan, menjaga stabilitas dan reputasi PT. BLY di tengah persaingan.

b) Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

PT. BLY menginternalisasi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, terutama dalam administrasi, pelaporan, dan pembayaran. Akuntabilitas berarti adanya kejelasan peran, pelaksanaan tugas, serta tanggung jawab dalam struktur organisasi perusahaan (Sudarmanto et al., 2021). Faktor pendukungnya antara lain perencanaan pembayaran rutin, verifikasi laporan kas, dan tanggung jawab atas selisih dana. Staf kasir dan pembayaran juga memastikan data laporan dan faktur lengkap, didukung pengawasan internal serta pelaporan rutin untuk pembayaran besar. Namun, akuntabilitas di PT. BLY terkendala oleh kesalahan pencatatan faktur, ketidaktepatan pembayaran, keterbatasan informasi *cash opname*, dan koordinasi yang bergantung pada otorisasi pimpinan, sehingga mengganggu pengelolaan utang dan piutang. Utang usaha adalah kewajiban perusahaan yang timbul dari transaksi pengadaan barang atau jasa secara kredit kepada *supplier* (Rahmawati & Handayani, 2025). Sementara itu, piutang usaha merupakan aset lancar yang muncul akibat penjualan barang atau jasa secara kredit, dengan pembayaran yang dilakukan pelanggan dalam periode tertentu setelah barang atau jasa diterima (Afifah & Handayani, 2025). Laporan *aging* piutang dan utang yang masih dalam kategori wajar menjadi salah satu bukti bahwa akuntabilitas di PT. BLY terjaga dengan baik dan pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas melalui pengawasan dan tanggung jawab menciptakan sistem keuangan yang terpercaya dan efisien. Berdasarkan hasil wawancara staf, menunjukkan bahwa prinsip ini mendorong ketelitian, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan koordinasi, sehingga pengelolaan keuangan PT. BLY menjadi lebih transparan, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dan kelangsungan perusahaan.

c) Prinsip Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip responsibilitas menjadi kunci agar PT. BLY mampu mengelola keuangan secara efektif dan bertanggung jawab, terutama dalam administrasi, verifikasi dokumen, dan pembayaran. Responsibilitas menuntut perusahaan untuk mematuhi hukum dan norma yang berlaku serta melaksanakan kewajiban sosialnya (Sudarmanto et al., 2021). Faktor pendukung responsibilitas di PT. BLY meliputi kepatuhan dokumen, koordinasi antar bagian, dan perencanaan pengeluaran yang teratur. Staf memastikan transaksi didukung

dokumen lengkap dan diverifikasi. Namun, hambatan muncul dari dokumen yang kurang lengkap, keterlambatan koordinasi, dan ketergantungan pada otorisasi pimpinan. Hambatan ini dapat mengganggu dalam pengelolaan utang usaha dan piutang usaha. Laporan *aging* piutang dan utang yang masih terjaga wajar menunjukkan PT. BLY telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam menjaga kelancaran arus kas dan memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu. Melalui penerapan prinsip responsibilitas yang konsisten, PT. BLY berhasil meningkatkan akurasi dan kelengkapan dokumen, memperlancar koordinasi antar bagian, serta meminimalkan risiko keterlambatan dan kesalahan pembayaran. Berdasarkan hasil wawancara staf, hal ini berkontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas keuangan dan membangun kepercayaan yang kuat antara perusahaan, *customer*, dan *supplier*, sehingga memperkuat posisi PT. BLY dalam persaingan bisnis yang ketat.

d) Prinsip Independensi (*Independence*)

Independensi memastikan pengelolaan perusahaan berjalan secara objektif tanpa adanya campur tangan atau konflik kepentingan dari pihak manapun (Sudarmanto et al., 2021). Prinsip ini sangat penting agar PT. BLY dapat menjalankan tata kelola keuangan secara objektif dan profesional, tanpa adanya tekanan yang dapat mengganggu proses kerja dan pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaannya, setiap staf di divisi keuangan berupaya menjaga profesionalisme dengan tetap patuh pada prosedur dan aturan yang berlaku, meskipun menghadapi tekanan dari pihak internal maupun eksternal. Independensi di PT. BLY didukung oleh SOP ketat, dokumen lengkap, dan koordinasi antar bagian. Staf hanya memproses pembayaran jika dokumen sesuai prosedur, meski ada tekanan. Penggunaan *checklist* membantu memastikan kelengkapan dokumen. Hambatan utama adalah tekanan dari pihak lain dan ketergantungan pada dokumen lengkap. Laporan *aging* piutang dan utang yang menunjukkan kondisi wajar juga menjadi bukti bahwa independensi terjaga dalam verifikasi dokumen dan proses pembayaran, sehingga tidak ada intervensi yang memengaruhi kualitas pengelolaan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara staf, terlihat bahwa penerapan independensi di PT. BLY mampu menjaga objektivitas dan profesionalisme staf dalam menjalankan tugas, meskipun ada tekanan dari berbagai pihak. Prinsip independensi memastikan proses pembayaran dan penagihan berjalan transparan dan sesuai prosedur, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dan penyalahgunaan, sekaligus memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap integritas pengelolaan keuangan PT. BLY dan mendukung keberlanjutan serta reputasi perusahaan jangka panjang.

e) Prinsip Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran menegaskan perlakuan yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing (Sudarmanto et al., 2021). Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang diistimewakan maupun dirugikan dalam proses keuangan perusahaan. Faktor pendukung penerapan kewajaran di PT. BLY meliputi penerapan SOP yang konsisten, penggunaan dokumen resmi sebagai dasar transaksi, serta prosedur yang seragam bagi seluruh *supplier* dan *customer* tanpa pengecualian. Proses pembayaran dan penagihan dilakukan berdasarkan kelengkapan dokumen serta tanggal jatuh tempo, sehingga menghindari potensi perlakuan diskriminatif. Adapun faktor penghambatnya mencakup keterlambatan pengiriman dokumen dari pihak eksternal dan adanya potensi tekanan untuk mempercepat proses di luar ketentuan yang berlaku. Laporan *aging* piutang dan utang yang masih wajar menjadi salah satu indikasi bahwa prinsip kewajaran telah diterapkan dengan baik, sehingga seluruh pihak diperlakukan setara dan sesuai ketentuan. Meskipun demikian, pelaksanaan tetap dijalankan secara konsisten sesuai prosedur. Berdasarkan hasil wawancara staf, penerapan prinsip kewajaran di PT. BLY berhasil menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang adil dan konsisten, dimana seluruh *supplier* dan *customer* diperlakukan secara setara tanpa pengecualian. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan kepercayaan antar pihak terkait, tetapi juga meminimalkan risiko konflik dalam proses pembayaran dan penagihan. Dengan demikian, prinsip kewajaran menjadi fondasi penting yang mendukung reputasi positif dan kelangsungan bisnis PT. BLY di tengah persaingan yang kompetitif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di PT. BLY dalam proses pembayaran kepada *supplier* dan penagihan piutang usaha kepada *customer* telah berjalan dengan baik. Kelima prinsip utama yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran diaplikasikan secara konsisten melalui penggunaan dokumen lengkap, koordinasi antar bagian, serta perencanaan dan pengawasan yang teratur. Faktor pendukung utama meliputi kepatuhan pada SOP, sistem pencatatan yang rapi, dan komunikasi efektif antar divisi. Meski begitu, terdapat kendala seperti keterlambatan pengiriman dokumen yang berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan tata kelola perusahaan.

Meskipun penerapan prinsip-prinsip tersebut sudah baik, kesalahan akibat faktor *human error* masih mungkin terjadi sehingga diperlukan ketelitian dan kehati-hatian ekstra dalam setiap tahapan proses untuk mencegah potensi kesalahan. Konsistensi pelaksanaan prinsip GCG berkontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan reputasi PT. BLY sebagai entitas profesional dan terpercaya. Selain itu, laporan aging piutang dan utang yang menunjukkan kondisi umur wajar menjadi indikator positif bahwa pengelolaan keuangan perusahaan berjalan efektif dan mendukung kesehatan arus kas PT. BLY. Oleh karena itu, disarankan agar PT. BLY mengoptimalkan sistem informasi keuangan, meningkatkan pelatihan dan kesadaran staf, serta memperkuat sosialisasi antar bagian guna meningkatkan koordinasi dan kepatuhan prosedur secara konsisten. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji implementasi GCG di sektor lain atau aspek pengelolaan risiko yang lebih spesifik untuk gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Lasmana, J. S. (2024). *Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Siklus Pembelian Barang Import Pada PT. Milko Beverage Industry*. 4, 11528–11541. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/14514>
- Afifah, M. N., & Handayani, A. (2025). Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang pada PT ABC. *Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 15. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/covalue/article/view/4997/4030>
- Amalia, Z. Z. (2025). *Analysis On Accounts Receivable Of PT Asphalt Bangun Sarana Aspal Against PSAK Analisis Akuntansi pada Piutang Usaha PT Asphalt Bangun Sarana Aspal terhadap PSAK Accounting*. 1(2), 93–102. <https://doi.org/10.70963/jbisma.v1i2.139>
- Anorue, H. C., & Ugwoke, E. O. (2022). Management of Account Receivable and Payable for Improved Financial Performance of Small Scale Industries in Imo State, Nigeria. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 06(04), 100–107. <https://doi.org/10.47772/ijriss.2022.6408>
- Antara News. (2025). *Bank DKI Raih Penghargaan The Best Indonesia GCG Award 2025*. Antara News. Diambil kembali dari <https://www.antaranews.com/berita/4661877/bank-dki-raih-penghargaan-the-best-indonesia-gcg-award-2025>
- Budi gautama Siregar. (2021). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 31–41. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3799>
- Deventer, I. A. Van. (2023). *A study of trade credit : Best practices for managing accounts receivable*. 8(2), 53–58. <https://j.arabianjbmr.com/index.php/ijar/article/view/1195>
- Enow, S. T., & Kamala, P. (2016). The accounts payable management practices of small, medium and micro enterprises in the Cape Metropolis, South Africa. *Investment Management and Financial Innovations*, 13(1), 77–83. [https://doi.org/10.21511/imfi.13\(1\).2016.07](https://doi.org/10.21511/imfi.13(1).2016.07)
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF. In *Rake Sarasini* (Issue March). <https://www.researchgate.net/profile/Anita->

- Maharani/publication/359652702_Metodologi_Penelitian_Kualitatif/links/6246f08b21077329f2e8330b/Metodologi-Penelitian-Kualitatif.pdf
- Irna Susilawati, Kasmanto Miharja, Indriyani Diwantari, & Lutfia Putri Salsabila. (2024). Analisis Efektivitas Pemeriksaan Akuntansi Terhadap Pengendalian Internal Akuntansi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(3), 60–74. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v3i3.3745>
- Kusumaningtias, R., Ludigdo, U., Irianto, G., & Dedi Mulawarman, A. (2016). Accounting and Ethics in Good Corporate Governance: Agency Theory Perspective. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 24(9), 2693–2698. <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2016.24.09.23929>
- Kuswanto, A. (2024). Indonesia Insurance Corporate Governance: A Literature Review. *East African Scholars Journal of Economics, Business and Management*, 7(04), 106–117. <https://doi.org/10.36349/easjebm.2024.v07i04.003>
- Lahengking, E. M., Elim, I., & Pusung, R. (2017). Analisis piutang usaha pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 357–370. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17722.2017>
- Liputan.6. (2024). *Indonesia Re Perkuat Penerapan Good Corporate Governance*. Liputan.6. Diambil kembali dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5686576/indonesia-re-perkuat-penerapan-good-corporate-governance>
- Mudin, R., Hadady, E. H., & Ali Taslim, F. (2023). Analisis Pengaruh Rasio Hutang dan Laba Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020. *Jurnal Studi Manajemen Organisasi*, 20(2), 30–51. <https://doi.org/10.14710/jsmo.v20i2.59042>
- Pramesti, N. C., & Purnamawati, I. G. A. (2024). *Analisis Piutang Usaha Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng*. 14(2), 245–255. <https://doi.org/10.23887/jiah.v14i2.78150>
- Priono, H., Yuhertiana, I., Sundari, S., & Puspitasari, D. S. (2019). Role of Financial Management in the Improvement of Local Government Performance. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(1), 77–86. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7110>
- Rahmawati, N. A., & Handayani, A. (2025). Analisis Sistem Pembayaran Hutang Usaha pada Unit Purchasing PT ABC. *Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 15. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/covalue/article/view/4995/4028>
- Ramadhani Sam, A. A., Haliah, H., & Kusumawati, A. (2024). *Disclosure of Transparency, Accountability and Value for Money Concept in Public Sector Financial Management: A Systematic Literature Review*. 3(1), 228–241. <https://doi.org/10.55227/ijerfa.v3i1.245>
- Rochendi, T., & Soesanto, S. (2023). Akuntabilitas Akuntansi Mendukung Good Corporate Governance Perusahaan Terbuka. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 10(2), 2043–2050. <https://doi.org/10.32722/account.v10i2.5796>
- Sandy, K. N., Haliah, & Nirwana. (2025). Transparency and Accountability in Report Management. *International Journal of Economics Social and Technology*, 4(2), 61–66. <https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/ijest/article/view/654>
- Sudarmanto, E., Susanti, E., Revida, E., Pelu, M. F. A., Purba, S., Astuti, Purba, B., Silalahi, M., Anggusti, M., Sipayung, P. D., & Krisnawati, A. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. Penerbit Yayasan Kita Menulis. https://martonomily.com/wp-content/uploads/2024/07/FullBook-Good-Corporate-Governance-_web.pdf
- Surono, B. A. A., RahaySuu, S. M., & A, Z. Z. (2015). Pengelolaan Piutang Yang Efektif Sebagai Upaya Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus Pada Perusahaan CV Walet Sumber Barokah Malang Periode 2012-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 28(1), 15–24. <https://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1122>